



**ADMINISTRASI PEMILU PRESIDEN DI MASA
REFORMASI: STUDI KOMPARATIF PILPRES DI
INDONESIA (2005) DAN MADAGASKAR (2013)**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Rabemanana Tsilova Mahandry Eddy

8111412315

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

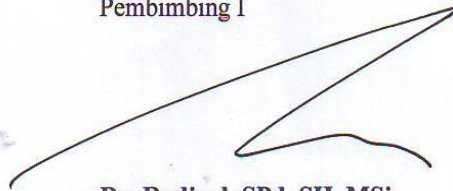
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Administrasi Pemilu Presiden Di Masa Reformasi: Studi Komparatif Pilpres Di Indonesia (2005) Dan Di Madagaskar (2013)**” disusun oleh Rabemanana Tsilova Mahandry Eddy (NIM. 8111412315), telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *3 October 2017*

Pembimbing I



Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi
NIP. 197206192000032001

Pembimbing II



Dani Muhtada, Ph.D
NIP. 197804152008121002

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum
NIP. 196205171986091001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “**Administrasi Pemilu Presiden Di Masa Reformasi: Studi Komparatif Pilpres Di Indonesia (2005) Dan Di Madagaskar (2013)**” disusun oleh Rabemanana Tsilova Mahandry Eddy (NIM. 8111412315), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 30 Mei 2018

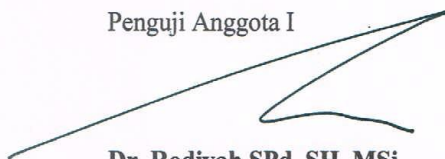
Penguji Utama,



Dr. Martitah, M.Hum.

NIP. 196205171986012001

Penguji Anggota I



Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi

NIP. 197206192000032001

Penguji Anggota II



Dani Muhtada, Ph.D

NIP. 197804152008121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNNES



Dr. Rodiyah., S.Pd., S.H., M.Si.

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

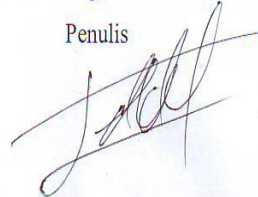
Nama : Rabemanana Tsilova Mahandry Eddy

NIM : 8111412315

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Administrasi Pemilu Presiden Di Masa Reformasi: Studi Komparatif Pilpres Di Indonesia (2005) Dan Di Madagaskar (2013)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 30 Mei 2018

Penulis



Rabemanana Tsilova Mahandry Eddy
NIM. 8111412315

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rabemanana Tsilova Mahandry eddy

NIM : 8111412315

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul :

Administrasi Pemilu Presiden Di Masa Reformasi: Studi Komparatif Pilpres Di Indonesia (2005) Dan Di Madagaskar (2013)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal :

Yang menyatakan,



Rabemanana Tsilova Mahandry Eddy
NIM. 8111412315

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

1. Nothing is impossible.
2. Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.
(Martin Luther King, Jr)

Persembahan

Karya ini dipersembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan.
2. adik Rabemanana Tsitindria Lovanandrianina Rickyel
3. Saudara dan Keluarga yang mendukung dan mendoakan
4. Sahabat-sahabatku dan semua dilingkungan Unnes.
5. Almamater.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Administrasi Pemilu Presiden Di Masa Reformasi: Studi Komparatif Pilpres Di Indonesia (2005) Dan Di Madagaskar (2013)”. Dengan selesainya skripsi ini dalam menempuh studi strata 1 di Fakultas Hukum, maka penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan selaku pembimbing I yang senantiasa sabar membimbing dan mengayomi memberi saran membangun dalam menyusun skripsi ini.
3. Dr. Martitah, M.Hum. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd.,M.H. Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H.,M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Drs. Sartono Sahlan., M.H. selaku penguji utama skripsi yang telah menilai, memberikan masukan dan saran yang membangun.
7. Dani Muhtada., Ph.D. selaku dosen Pembimbing II dan juga dosen wali yang telah sabar dalam membimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk, kritik serta saran dalam menyelesaikan skripsi.
8. kampus yang senantiasa memberikan masukan.
9. Dosen dan Staf Akademika Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
10. Kedua orang tua, Bapak Rabemanana Jean Gloris dan Ibu Lovanandrasana Fanjharinivo yang telah memberikan cinta, kasih sayang, perhatian, kepercayaan, dukungan, perjuangan, dan doa yang tiada terbatas.
11. Keluarga Kos

12. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut limpahkan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.



Semarang, Mei 2018

Penulis,

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

ABSTRAK

Rabemanana Tsilova Mahandry Eddy. 2018. Administrasi Pemilu Presiden Di Masa Reformasi: Studi Komparatif Pilpres Di Indonesia (2005) Dan Di Madagaskar (2013). Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Dr. Rodiyah., S.Pd., S.H., M.Si. Pembimbing II, Dani Muhtad, Ph.D.

Kata Kunci : Administrasi pemilu, Reformasi, Transisi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang tersebut mengatur terutama tentang penyelenggaraan pemilihan umum disini disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan keanggotaannya, dan *la loi No. 2012-004 du 01 Fevrier 2012 fixant l'organisation, le fonctionnement et les attribution de la CENI-T* (Undang-Undang No. 2012-004 tanggal 01 Februari 2012 menentukan organisasi, operasi dan atribusi CENI-T), kedua Undang-Undang tersebut menjadi jawaban atas permasalahan yang ada. Permasalahan yang akan di kaji yaitu; (a) penyelenggaraan administrasi pemilu di Indonesia pada masa reformasi (2005) dan penyelenggaraan administrasi pemilu presiden di Madagaskar pada masa transisi (2013). (b) perbedaan administrasi pemilu presiden di Indonesia pada masa reformasi (2005) dan administrasi pemilu presiden di Madagaskar pada masa transisi (2013).

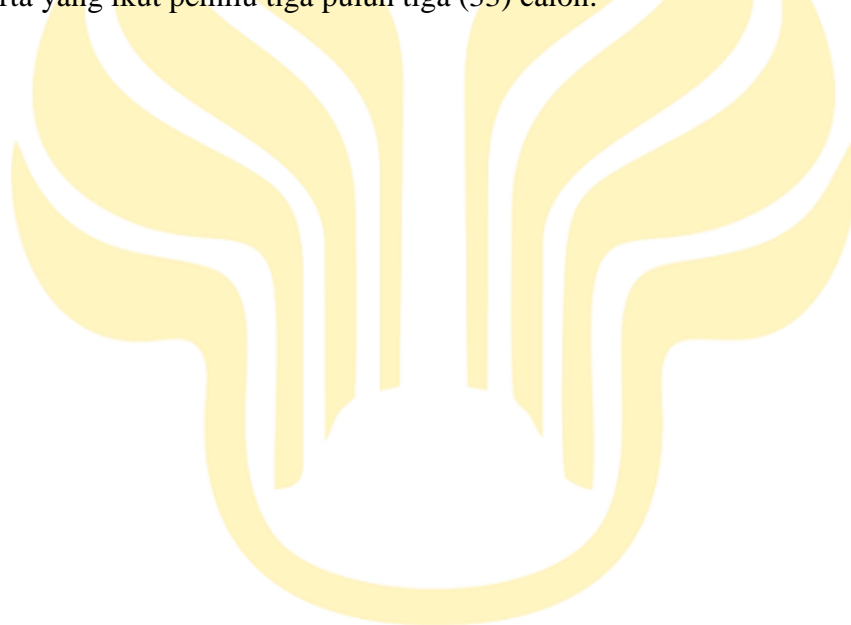
Penyajian analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang berjenis penelitian yuridis normatif. Fokus penelitian terhadap Administrasi Pemilu Presiden Di Masa Reformasi: Studi Komparatif Pilpres Di Indonesia (2005) Dan Di Madagaskar (2013), fokus penelitian disini adalah di Indonesia dengan mengumpulkan data yang ada di Indonesia dan Madagaskar. Sumber data penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder, data primer diambil dari bahan hukum Administrasi pemilu, data sekunder terdiri dari buku, jurnal dan artikel ilmiah terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah: Studi kepustakaan.

Transisi menuju demokrasi yang dilakukan oleh negara berkembang menyeratkan peran yang besar. Pemilihan umum adalah satu cara untuk keluar dari transisi tersebut, dan juga untuk demokratis. Administrasi pemilu pada masa reformasi maupun transisi mempunyai peran yang sangat besar, dan tantangan untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat di masa depan agar menciptakan kesejahteraan dan kepastian dalam masyarakat.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah; (1) Administrasi pemilu presiden di Indonesia pada masa reformasi (2005) sudah mampu mengatasi pemilihan, namun masih harus diperbaiki, Undang-Undang yang membatasi lembaga negara pengurus pemilu. Waktu persiapan pemilu yang bisa dikatakan kurang, untuk melaksanakan pemilu terutama dalam hal sosialisasi masyarakat. (2) Administrasi pemilu presiden di Madagaskar pada masa transisi (2013) cukup bisa mengatasi

pemilihan tersebut, karena masalah yang terjadi pada masa transisi tidak mudah, namun masih banyak kekurangan harus diperbaiki, Undang-Undang bersifat sementara yang dibuat khusus untuk pemilu tersebut, lembaga negara yang tidak independen, karena sebagiannya terdiri dari partai politik yang ikut pemilihan, anggaran yang kurang untuk melakukan pemilihan.

Simpulan penelitian, (1) Perbedaan pemilu presiden indonesia dan Madagaskar cukup banyak tetapi yang jelas adalah; pada masa reformasi (2005) yang dipilih adalah Presiden dan Wakil presiden, lembaga negara (KPU) yang mengatur pemilu pada masa reformasi bersifat mandiri dan independen, jumlah peserta yang ikut pemilu lima pasangan; (2) di Madagaskar pada masa transisi (2013) yang dipilih adalah Presiden, kalau lembaga negara (CENI-T) yang mengatur pemilu pada masa transisi bersifat sementara, dan yang terakhir jumlah peserta yang ikut pemilu tiga puluh tiga (33) calon.



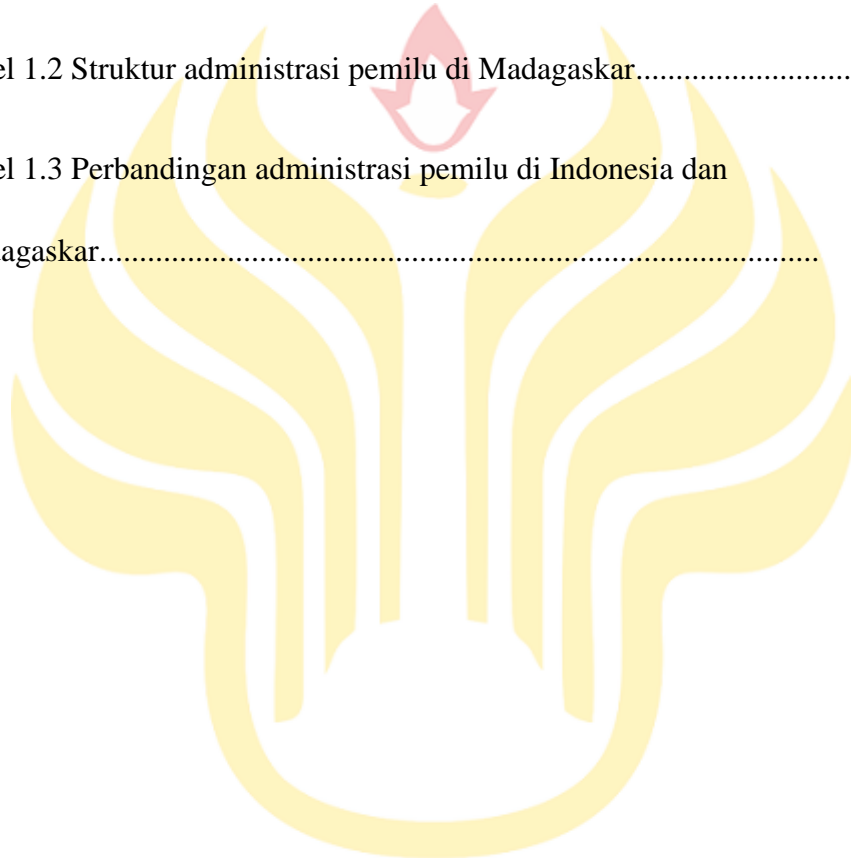
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 7 |
| 1.3 Pembatasan Masalah | 8 |
| 1.4 Perumusan Masalah | 8 |
| 1.5 Tujuan penelitian | 9 |
| 1.6 Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 11 |
| 2.2 Landasan Teori | 14 |
| 2.2.1 Teori Reformasi Perspektif Ilmiah | 14 |
| 2.2.2 Teori Komparatif | 15 |
| 2.2.3 Teori Kedudukan Komisi Pemilihan Independen National Untuk Transisi/CENI-T | 16 |
| 2.3 Landasan Konseptual | 17 |
| 2.4 Kerangka Berfikir | 19 |
| 2.4.1 Penjelasan | 21 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 23 |
| 3.1 Pendekatan Penelitian | 23 |

| | |
|---|-----------|
| 3.2 Jenis Penelitian..... | 25 |
| 3.3 Fokus Penelitian | 26 |
| 3.5 Sumber data Penelitian..... | 28 |
| 3.6 Teknik Pengambilan Data | 29 |
| 3.7 Validitas Data | 30 |
| 3.8 Analisis Data..... | 31 |
| 3.8.1 Pengumpulan Data | 31 |
| 3.8.2 Reduksi Data | 31 |
| 3.8.3 Penyajian Data..... | 31 |
| 3.8.4 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi..... | 32 |
| BAB IV Hasil dan Pembahasan | 33 |
| 4.1 Pemilu Presiden di Indonesia dan di Madagaskar..... | 33 |
| 4.1.1 Pemilu Presiden di Indonesia | 33 |
| 4.1.2 Pemilu Presiden di Madagaskar | 42 |
| 4.2 Administrasi Pemilu di Indonesia dan di Madagaskar..... | 50 |
| 4.2.1 Administrasi Pemilu di indonesia | 50 |
| 4.2.1.1 Manajemen Waktu | 51 |
| 4.2.1.2 Pendaftaran Pemilih | 53 |
| 4.2.1.3 Pengadaan dan Distribusi Logistik | 56 |
| 4.2.1.4 Kelembagaan Penyelenggara Pilpres..... | 56 |
| 4.2.1.5 Anggaran | 60 |
| 4.2.2 Administrasi Pemilu di Madagaskar..... | 62 |
| 4.2.2.1 Hak untuk Memilih..... | 67 |
| 4.2.2.2 Komposisi CENI-T..... | 68 |
| 4.2.2.3 Prosedur Pemungutan Suara..... | 73 |
| 4.3 Perbedaan Administrasi Pemilu presiden Indonesia dan Madagaskar..... | 76 |
| BAB V Penutup | 81 |
| 5.1 Simpulan | 81 |

| | |
|--|-----------|
| 5.2 Saran..... | 82 |
| Daftar Pustaka..... | 83 |
| | |
| Daftar Tabel | |
| Tabel 1.1 perbandingan penelitian tentang administrasi pemilu | 06 |
| Tabel 1.2 Struktur administrasi pemilu di Madagaskar..... | 71 |
| Tabel 1.3 Perbandingan administrasi pemilu di Indonesia dan Madagaskar..... | 74 |



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transisi menuju demokrasi yang dilakukan oleh beberapa negara berkembang menyeratkan peran yang lebih besar untuk proses pemilihan dalam menentukan arah kebijakan sosial dan ekonomi, dan pembangunan nasional. Konsolidasi demokrasi membutuhkan pemahaman yang lebih baik dari perilaku pemilihan, dan dimensi nyata dari kebebasan politik. Transisi tersebut yang merupakan cara terbaik untuk menganalisis panggung politik, yang memungkinkan perbandingan tuntutan rakyat dengan program dibawa oleh anggota politik.

Pemilihan umum merupakan perwujudan syarat bagi negara demokrasi perwakilan di bawah *rule of law* sebagaimana dirumuskan oleh *international commission of jurist di Bangkok pada tahun 1965*. Pemerintahan berdasarkan demokrasi, yaitu pemerintahan dimana warganegara melaksanakan hal yang sama tetapi melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan bertanggung jawab kepada mereka melalui pemilihan-pemilihan yang bebas.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pemilihan umum yang bebas merupakan keharusan dan juga suatu lembaga yang sangat vital untuk demokrasi. Pemilihan yang bebas berarti bahwa dalam suatu jangka waktu rakyat akan mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pemerintahannya melalui penyampaian aspirasi politik rakyat dengan cara memilih atau pemilu untuk menempatkan wakilnya di

pemerintahan. Selanjutnya menurut Rousseau adanya suatu perwakilan kekuasaan yang ditentukan oleh rakyat merupakan wujud kedaulatan rakyat yang disampaikan melalui sistem perwakilan dengan diterapkannya sistem demokrasi yang menunjukkan adanya hubungan antara ajaran kedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi dalam suatu rangkaian yang terintegrasi. Tapi sebelum demokrasi tersebut harus ada perubahan yang cukup signifikan yaitu transisi. Disini bisa dikatakan kalau transisi adalah sebagai pintu gerbang tahap pertama yang sangat menentukan proses demokratisasi. (Sunny,1968, hl.56)

Kamus bahasa latin, “transisi” berasal dari kata “*trans*” dan “*cendo*”. *Tans* sendiri berarti di seberang, di sebelah sana, dibalik, menyeberangi, sedangkan *cendo* berarti melangka ke suatu yang lain berpindah ke sebelah sana. Dari pengertian tersebut, maka transisi disini jika melihat gagasan-gagasan “Orde Baru dan Transisi”, dimana pada orde baru paling banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan tumbangya kekuasaan orde baru dan mendesak dilaksanakan demokratisasi. (Raharjo, 1999, hl.19)

Singkatnya transisi peralihan dari masa orde baru yang otoriter ke masa demokrasi. Dalam kamus umum karangan transisi juga berarti masa peralihan, pengertian transisi adalah suatu masa peralihan kekuasaan dari kekuasaan otoriter ke kekuasaan demokratik atau dari sistem otoriter ke sistem demokratik.

Indonesia merupakan salah satu negara yang saat ini mengalami proses transisi demokrasi. Setelah lepas dari pemerintahan orde lama dan beralih ke pemerintahan orde baru tidak membuat Indonesia menjadi negara yang

demokrasi. Runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1998 menjadikan Indonesia mengalami perubahan di berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemerintahan orde baru ini dibangun atas tiga pilar yakni militer, birokrasi dan golongan karya. Rezim orde baru ini lebih tepat disebut rezim otoriter birokratik, militer yang sejatinya menjalankan profesionalismenya sebagai tentara, selama orde baru terlibat secara aktif dalam ranah politik. Melalui doktrin dan fungsi ABRI, militer/TNI membenarkan keterlibatan mereka dalam politik, keterlibatan militer dalam politik ini dapat dilihat dari banyaknya perwakilan mereka yang duduk di lembaga-lembaga negara, baik itu eksekutif maupun legislatif. Sehingga tidak ada yang namanya supremasi sipil atas militer karena militer benar-benar mengontrol kehidupan sipil. Selama rezim orde baru ini, rakyat benar-benar dibungkam, tidak ada kebebasan politik yang diberikan oleh rakyat. Selain itu tidak ada kebebasan, banyak orang yang dipenjara akibat memuat berita yang mengkritik pemerintahan, sehingga tidak ada sebuah proses demokrasi, dimana kebebasan politik bagi rakyat adalah salah satu syarat yang paling penting. Lengkapnya pemerintahan Presiden Soeharto mengatakan Indonesia pada reformasi, gerakan reformasi tersebut yang dilakukan oleh rakyat telah berhasil memutus mata rantai kekuasaan otoriter orde baru yang dipimpin oleh Soeharto.

Indonesia memasuki babak baru, khususnya di bidang politik. Reformasi adalah masa penting bagi Indonesia, reformasi politik menjadi sesuatu yang paling mendesak. Demokrasi menjadi kebutuhan yang mutlak untuk mengembalikan kedaulatan rakyat yang telah lama hilang akibat orde baru,

sebagai negara yang baru lepas dari otoritarisme, tentunya Indonesia berada dalam sebuah transisi. Selama berada dalam fase transisi ini, sebuah negara berada dalam kondisi yang tidak pasti. Transisi ini adalah fasa yang sangat penting karena penanganan masalah selama transisi termasuk penyikapan akan kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh rezim sebelumnya akan sangat menentukan kemana arah sebuah negara. (O'Donnell dan Schmitter, 1993, hl.6.)

Pengalaman negara-negara yang baru keluar dari lingkungan pemerintahan yang otoriter, Indonesia tentunya mengalami kondisi yang serupa. Terbukanya kran kebebasan politik sipil, mengantarkan Indonesia memasuki babak baru dalam kehidupan bernegara. Pengalaman pahit yang sangat lama dalam pemerintahan otoriter orde baru, membuat masyarakat menginginkan perubahan yang fundamental di berbagai ranah. Demokratisasi menjadi sebuah pilihan rakyat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Indonesia berada dalam transisi, yang dari otoritarisme menuju demokrasi. Transisi demokrasi menjadi masa yang paling krusial untuk Negara Indonesia. Berbagai kemungkinan dapat saja terjadi selama transisi demokrasi ini. Transisi dari rezim otokratis dan otoriter dapat mengarahkan pada hasil yang beragam. (O'Donnell dan Schmitter, 1986, hl. 45.)

Ada empat (4) hasil kemungkinan yang beragam dari satu kasus lainnya. Pertama, kembali ke otokrasi. Kedua, pembentukan rezim hybrid/campuran yang tidak memenuhi kriteria prosedur minimal demokrasi, namun tidak dianggap mundur ke statusnya. Ketiga, demokrasi yang tidak terkonsolidasi. Hal ini jarang sekali diidentifikasi para ahli politik, dimana rezim terjebak dalam kategori ini, sampai batas yang tertentu, terbawa kedalam demokrasi tanpa merasakan

keuntungan yang ditawarkan demokrasi. Keempat adalah kondisi yang paling diinginkan, demokrasi yang terkonsolidasi. Transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia hanya salah satu contoh, karena dalam dekade terakhir ini ditandai dengan beberapa kasus transisi demokrasi di seluruh dunia.

Negara Republik Madagaskar resmi menerima kemerdekaannya pada tanggal 26 Juni 1960. Seperti banyak negara di dunia, Negara Republik Madagaskar tidak bisa menghindari dari masalah-masalah termasuk salah satunya yang membawa perubahan cukup signifikan bagi Negara Republik Madagaskar yaitu pada tahun 2009. Pada tahun tersebut Negara Republik Madagaskar mengalami periode disebut *transitoir* (transisi) yang berlangsung empat tahun. Pemerintah untuk menangani transisi tersebut telah mendirikan beberapa lembaga-lembaga independen. Salah satu dari lembaga tersebut adalah komisi pemilihan independen nasional untuk transisi, lembaga ini didirikan untuk menentukan kelahiran pemerintahan baru dan tentunya republik keempat bagi negara Madagaskar melalui pemilu.

Komisi Pemilihan Independen Nasional untuk Transisi (Commission Electoral Nationale Independante pour la Transition/CENI-T) mempunyai peran yang cukup penting “*garanti moralement l’authenticite du scrutin et la sincerite du vote*”¹ yaitu jaminan moral keaslian suara dan ketulusan suara seperti yang diatur dalam “*No 2012-004 du 1er fevrier 2012 fixant l’organisation*” yaitu undang-undang nomor 2012-004 pada 1 februari 2012 pendirian organisasi, fungsi dan alokasi struktur independen disebut sebagai *CENI-T*. Lembaga tersebut

¹Art.5.Fixant L’Organisation 2012-004

dianggap sebagai otoritas administratif independen, disitu sudah bisa dilihat perannya yang cukup signifikan karena memiliki kewajiban untuk netral dan impartial di seluruh proses pemilihan, untuk pemilu yang jujur, bebas dan transparan. Seperti yang diatur dalam “*No 2012-004 du 1er fevrier 2012 fixant l’organisation*”.

CENI-T dianggap sebagai otoritas administratif independen, lembaga tersebut memiliki kewajiban untuk netral dan imparcial di seluruh proses pemilihan, untuk pemilu yang jujur, bebas dan transparan (*Extrait de la LOI Organique numero 2012-005, 2012*)².

Peran dari komisi pemilihan independen untuk transisi tersebut memungkinkan dari satu tangan untuk membangun tradisi independensi dan imparcialitas untuk memastikan transparansi pemilu dan kedua, untuk memenangkan kepercayaan dari pemilih, partai dan gerakan politik. Jika lembaga-lembaga disebut adminstrasi pemilu tunduk pada korupsi, bagaimana dengan netralitas? Korupsi dapat berhubungan dengan setiap orang yang mendapatkan manfaat dari kekuatan pengambilan keputusan, dari kepribadian politik, pegawai negeri, bingkai, sendikat buruh atau organisasi mana mereka berasal.

Namun dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang korupsi yang berasal dari tokoh-tokoh politik dan pejabat, karena kita harus tau bahwa kredibilitas dan ketulusan hasil pemilu berasal dari netralitas administrasi pemilu tersebut, tetapi sebelum perubahan aktor-aktor politik harus mengubah perilaku

²Art. 128 Loi Organique No. 2012-005

mereka. Seringkali kita mendengar ataupun bisa melihat kalau aktor-aktor politik atau pun pejabat yang berada pada asal korupsi dalam situasi pemilu, kita harus tau juga kalau pelanggaran dalam pemilu tidak hanya pembelian suara.

Kalau membahas tentang pemilu, tidak asing lagi kita mendengar korupsi di dalamnya. Seringkali korupsi tersebut dalam bentuk suap yang dibagi untuk anggota administrasi pemilu agar mereka bisa memanipulasi hasil dari pemilu. Praktek tersebut sudah sering dilakukan oleh anggota-anggota politik, dan dinamakan *corruption electorale*. Namun kita harus tahu bahwa korupsi dalam pemilu itu tidak wajar dan melanggar hukum.

Administrasi yang diwakili oleh semua orang dan badan hukum yang melakukan kegiatan tersebut melakukan fungsi yang berbeda, tetapi yang diutamakan adalah penerapan hukum. Oleh karena itu semua administrasi dalam bentuk apapun atau pemerintah harus menghormati hukum yang diterapkan. Semua aturan yang ditetapkan harus diterapkan oleh semua orang. “nul n'est cense ingnorer la loi” (Ordonnance 62-041 19 September 1962)³; yaitu berarti tidak ada yang seharusnya mengabaikan hukum.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dilakukan identifikasi beberapa masalah yang di temukan, di antaranya:

1. Peran dan fungsi administrasi pemilu presiden di masa reformasi dan transisi

³ Ordonnance 62-041

2. Hukum dan peraturan masih bisa berjalan di masa reformasi dan transisi
3. Pemerintahan semakin tunduk pada korupsi
4. Keberadaan demokrasi dalam masa reformasi dan masa transisi
5. Pemerintahan kurang menghormati demokrasi

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini bertujuan pada suatu masalah tertentu dan lebih mendalam permasalahannya, maka perlu diadakan sebuah pembatasan masalah. Dalam penulisan ini penulis membatasi pada suatu masalah tertentu, yaitu:

1. Peran dan fungsi administrasi pemilu presiden di masa reformasi dan transisi.
2. Hukum dan peraturan masih bisa berjalan di masa reformasi dan transisi
3. Pemerintahan semakin tunduk pada korupsi
4. Keberadaan demokrasi dalam masa reformasi dan masa transisi.
5. Pemerintahan kurang menghormati demokrasi

1.4 Perumusan Masalah

Mendapat hasil yang sesuai dan tidak keluar dari judul pembahasan maka penyusun merumuskan permasalahan ke dalam beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana penyelenggaraan administrasi pemilu presiden di Indonesia pada masa reformasi (2005) dan penyelenggaraan administrasi pemilu presiden di Madagaskar pada masa transisi (2013)?

2. Bagaimana perbedaan administrasi pemilu presiden di Indonesia pada masa reformasi (2005) dan administrasi pemilu presiden di Madagaskar pada masa transisi (2013)?

1.5 Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan penyelenggaraan administrasi pemilu presiden di Indonesia pada masa reformasi (2005) dan administrasi pemilu presiden di Madagaskar pada masa transisi (2013).
- b. Menemukan perbedaan administrasi pemilu presiden di Indonesia pada masa reformasi (2005) dan administrasi pemilu presiden di Madagaskar pada masa transisi (2013).

1.6 Manfaat Penelitian

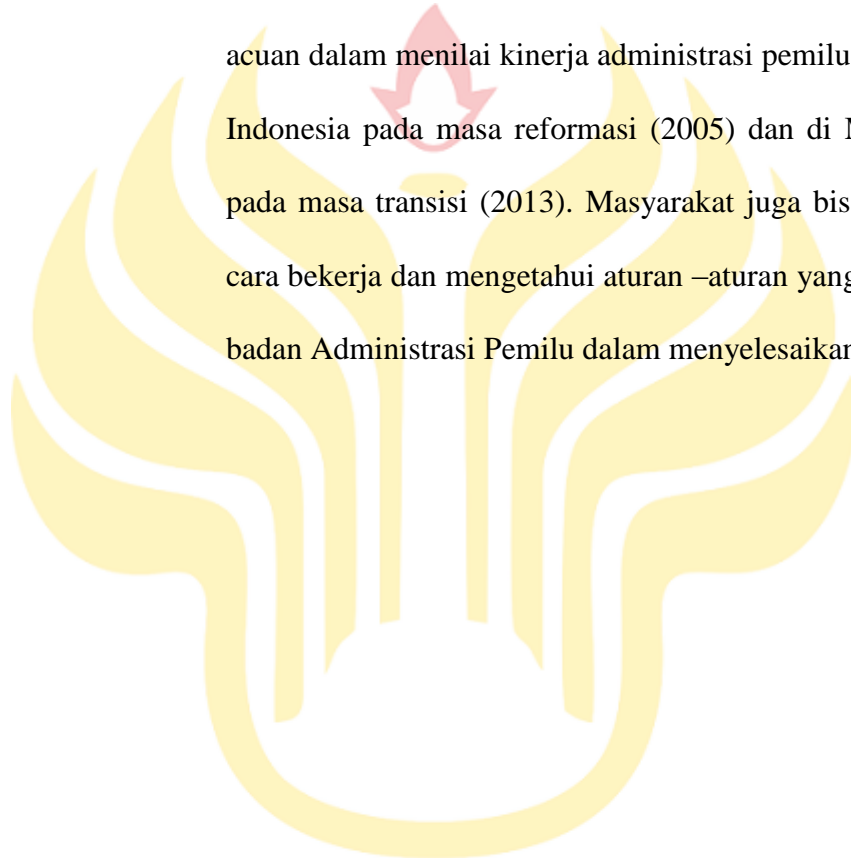
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

a. Manfaat Teoritis

1. Diperolehnya informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemilu presiden di Indonesia pada masa reformasi (2005) dan administrasi pemilu presiden di Madagaskar pada masa transisi (2013).
2. Memberikan kontribusi dan perkembangan ilmu pengetahuan terutama bagi ilmu Hukum, serta memberikan informasi tentang strategi lembaga negara.
3. Bagi akademik, hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang Administrasi Pemilu di masa Transisi Demokrasi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Indonesia dan Madagaskar dapat memberikan informasi dan bahan rujukan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan dalam menilai kinerja administrasi pemilu presiden di Indonesia pada masa reformasi (2005) dan di Madagaskar pada masa transisi (2013). Masyarakat juga bisa mengenal cara bekerja dan mengetahui aturan –aturan yang digunakan badan Administrasi Pemilu dalam menyelesaikan tugasnya.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Administrasi pemilu presiden tidak mudah apalagi kalau dilihat dalam sisi reformasi atau transisi. Seperti masalah korupsi dan netralitas dalam pelaksanaan pemilu. Yang menjadi fokus dalam perkara ini adalah, peran dan fungsi administrasi pemilu presiden di masa reformasi dan transisi. Beberapa peneliti melakukan penelitian tentang masalah reformasi, perbandingan pemilu dan netralitas administrasi.

Tabel 1.1 Perbandingan penelitian tentang administrasi pemilu

| No | Peneliti | Judul | Hasil Penelitian | Pembaruan |
|----|----------------------------|--|--|--|
| 1. | Nugrahaeni Kenyo Palupi | Hubungan kerja antara komisi pemilihan umum (KPU) dan panitia pengawas pemilu (PAWASLU) kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 sesuai UU nomor 42 tahun 2008 | Tahapan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian pemilihan umum Presiden dan Wakil presiden tahun 2014 yang diselenggarakan oleh KPU kabupaten Banjarnegara dan diawasi oleh Panwaslu Kabupaten Banjarnegara berjalan dengan baik. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara pada pelaksanaan pemilu Presiden yaitu terkait dengan DPT yang jumlah | Menganalisis administrasi pemilu presiden di Indonesia pada masa reformasi (2005) dan di Madagaskar pada masa transisi (2013). |

| | | | | |
|----|----------------|--|---|--|
| | | | <p>penghitungan antara KPU dan Panwaslu ada selisih paham. Selain DPT, mengenai pengadaan logistik juga mengalami kekurangan jumlah dikarenakan KPU yang kurang teliti dalam melakukan penghitungan, serta pada tahapan kampanye yang diduga terjadi pelanggaran politik uang dan tidak adanya STTP tim kampanye dalam pelaksanaan Kampanye. Pada PHPU Pilpres juga Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu kabupaten yang diperkarakan.</p> | |
| 2. | Aguzs Sudrazat | Perbandingan Sistem Pemilu Negara Amerika Serikat Dengan Sistem Pemilu Negara Cina | <p>Amerika serikat memiliki pemerintah federal, dengan pejabat terpilih di tingkat federal (national), negara bagian dan lokal. Pada tingkat nasional, kepala negara, para presiden, dipilih langsung oleh rakyat melalui elektoral. di zaman modern para pemilih hampir selalu memilih dengan suara populer. Semua anggota legislatif federal, kongres secara langsung dipilih sedangkan Neraga Republik Cina memilih pada tingkat Nasional, suatu kepala negara, presiden dan legislatif. Presiden dipilih untuk masa empat tahun oleh rakyat. Sebelum 2007, Yuan legislatif memiliki 225 anggota, 168 anggota dipilih untuk jangka waktu</p> | Membandingkan tentang pilpres di Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Madagaskar. |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | | | <p>tiga tahun dalam multi-kursi konstituen, 8 anggota yang mewakili penduduk asli, 41 anggota dipilih oleh perwakilan proporsional dan 8 anggota yang mewakili orang Tionkoa perantauan dipilih oleh perwakilan proporsional.</p> | |
| 3. | <p>RAHARISO L- ONDRAIBE Tinoka Malala Daniela</p> | <p>La Neutralite de l'Administration Pendant L'elections presidentiel (Netralitas Administrasi dalam Pemilu presiden).</p> | <p>Administrasi dalam masa pemilihan mempunyai kewajiban transparansi dan netralitas. Lembaga administrasi pemilu tersebut harus membuktikan atas netralitas karena ya melayani kepentingan umum. Administrasi memiliki struktur nasional independen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan. Ketika lembaga administrasi pemilu terlibat dalam penipuan dan korupsi banyak pertanyaan yang timbul. Melawan masalah tersebut tidak mudah, apa lagi kalau pejabat negara, tentara dan aktor-aktor politik tidak mendapat sanksi atas perbuatannya seperti kasih hadiah dan lai-lain.</p> | <p>Memanding administrasi pemilu di Indonesia (KPU) dan di Madagaskar (CENI-T).</p> |

2.2 Landasan teori

2.2.1 Teori Reformasi Perspektif Ilmiah

Pemerintah telah fokus melakukan reformasi yang bertujuan untuk memperbaiki birokrasi yang selama ini dinilai buruk oleh masyarakat. Reformasi sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan yang terdahulu, dimana dapat dilihat telah adanya usaha-usaha perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu.

Reformasi dapat diterjemahkan dengan pemaknaan upaya yang dilakukan untuk menjadikan pemerintahan lebih baik lagi dari sebelumnya. Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, konferensif, ditujukan untuk merealisasikan tata pemerintahan yang baik *Good Governance*, di sisi lain reformasi adalah suatu usaha yang dimaksud agar praktik-praktik politik, pemerintah, ekonomi dan sosial budaya yang dianggap oleh masyarakat tidak sesuai dan tidak selaras dengan kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat diubah atau ditata ulang agar menjadi lebih sesuai dan lebih selaras “socio-reformasi” (Widjaja 2011, hlm 39). Kemudian reformasi merujuk pada upaya yang dikehendaki *intended change*, dalam suatu kerangka kerja yang jelas dan terarah, oleh karena itu persyaratan keberhasilan reformasi adalah eksistensi peta jalan *road map*, menuju suatu kondisi, status dan tujuan yang ditetapkan sejak awal beserta indikator keberhasilannya (Prasojo 2009, hlm 103)

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa reformasi merupakan perubahan yang didalamnya terdapat upaya untuk menjadikan pemerintahan menjadi lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam hal ini dapat

dikatakan bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang baik, berarti fokus dari reformasi itu sendiri adalah birokrasi, karena birokrasi merupakan badan penyelenggara urusan negara. Sehingga untuk mewujudkan *Good Governance* berarti harus dilakukannya reformasi pada badan birokrasi

2.2.2 Teori Komparatif

Komparatif adalah suatu hal yang bersifat dan dapat diperbandingkan dengan suatu hal lain. Hal ini sesuai dengan teori komparatif yang dikemukakan bahwa perbandingan internal dapat terjadi hanya bila ada perbedaan keunggulan komparatif antara negara.

Komparatif sendiri dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori:

- a. Memperbandingkan sistem asing dengan sistem domestik dalam rangka menemukan kesamaan dan perbedaan.
- b. Studi yang menganalisis berbagai solusi secara obyektif dan sistematis yang ditawarkan oleh berbagai sistem untuk suatu masalah hukum tertentu.
- c. Studi yang menginvestigasi hubungan kausal antara sistem-sistem hukum berbeda.
- d. Studi-studi yang membandingkan tahap-tahap dari beberapa sistem hukum
- e. Studi yang berusaha menemukan atau mengkaji evolusi hukum secara umum berdasarkan sistem dan periodenya.

Transisi berasal dari kata “Trans” dan “Cendo”. Trans sendiri berarti di sebelah sana, dibalik, menyeberangi, sedangkan cendo berarti melangkah ke suatu yang lain, berpindah ke sebelah sana. Dari pengertian tersebut, maka transisi

disini jika melihat gagasan-gagasan buku “Orde Baru dan Transisi”, dimana pada masa orde baru paling banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan tumbanya kekuasaan Orde baru dan mendesak dilaksanakannya demokratisasi, singkatnya transisi berarti peralihan dari masa Orde baru yang otoriter ke masa demokrasi (Raharjo, 1999,hl.87.)

Kamus umum kerangan transisi berarti masa peralihan kekuasaan dari kekuasaan otoriter ke kekuasaan demokratik atau dari sistem otoriter ke sistem demokratik (Echols dan Shadily, 2004)

2.2.3 Teori Kedudukan Komisi Pemilihan Independen National Untuk Transisi/CENI-T

Tidak ada yang seharusnya mengabaikan hukum, CENI-T adalah menyelenggarakan pemilihan umum independen yang bertanggung jawab atas organisasi dan administrasi dalam pemilu, lembaga tersebut punya kekuasaan penuh dan tidak tunduk pada pemerintah yang ada. Karena itu dia disebut independen. Komisi pemilihan independen untuk transisi tersebut bersifat netral dan bertanggung jawab atas seluruh proses pemilu selama masa transisi. Sebelumnya, dia mempunyai misi utama yaitu adalah mengatur pemilu. Oleh karena itu dia:

- a. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemilihan umum: agar pemilu dilakukan dengan aman.
- b. pengintungan dan mempublikasikan hasil pemilu sementara: CENI-T hanya memproses hasil yang sementara. Kewajibannya adalah memberi tahu kepada masyarakat yang dikatakan hasil, dan lembaga

lain yang dipercayakan dengan publikasi hasil akhir. lembaga ini disebut Pengadilan Pemilihan khusus (cour electorale speciale/CES)

- c. Memastikan keadilan undang-undang pemilu di seluruh negeri menyelenggarakan pemilu yang bebas, adil, transparan dan kredibel: CENI-T didasari beberapa ideologi untuk realisasi pemilihan yang bebas dan transparan, untuk itu dia harus menjunjung tinggi hukum yang berkaitan dengan pemilu kepada orang-orang
- d. Memobilisasi masyarakat sipil dan mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan pemilu. Sebagai badan yang bertanggung jawab atas perilaku yang tepat dari pemilu, CENI-T harus memberitahu semua orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi pemilih berbagai peraturan terkait dengan itu
- e. Berkontribusi pada penjabaran dari kerangka hukum untuk proses pemilu

2.3 Landasan konseptual

Landasan konseptual merupakan landasan yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau di inginkan.

Landasan konseptual yang akan dibatasi pada konsepsi pemakaian istilah-istilah dalam penulisan ini yaitu “Administrasi Pemilu Presiden di Masa Reformasi: Studi Komparatif Pilpres di Indonesia (2005) dan Madagaskar (2013)”. Adapun pengertian dari istilah tersebut:

- a. Administrasi pemilu

Administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dari seluruh tahapan tersebut, ketika ada cara, prosedur, atau mekanisme yang dilanggar, dapat disebut dengan pelanggaran administrasi pemilu.

b. Masa reformasi

Reformasi adalah susunan tatanan perikehidupan lama diganti dengan tatanan perikehidupan baru secara hukum menuju perbaikan. Dengan demikian gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998 adalah suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan dan perubahan terutama dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum (Waridah dkk, 2003).

Namun reformasi yang diperlukan disini adalah, reformasi hukum yang bertujuan tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat.

c. Pilpres

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan berdasarkan cara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali pada hari libur dan hari yang diliburkan. Dan pemilu ini suatu rangkaian dengan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.

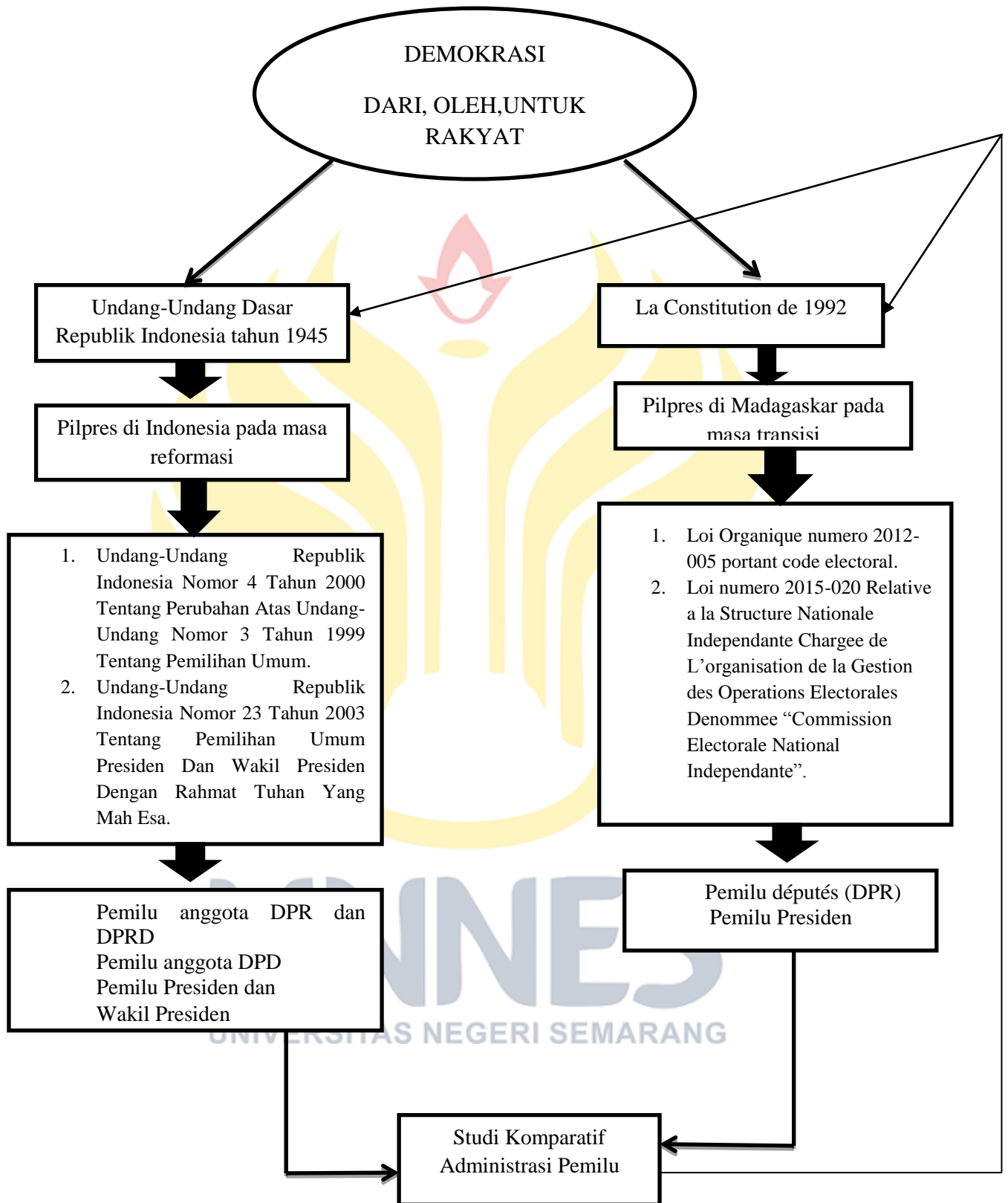
Di Madagaskar pemilihan presiden adalah proses pemilihan yang dilakukan untuk mendapat presiden suatu Negara atau Republik, untuk jangka waktu jabatan yang bervariasi. Ada dua metode yang sering digunakan yaitu: Pemilihan tidak langsung baik oleh parlemen atau oleh *grands electeurs* seperti di Amerika Serikat. Dan yang kedua pemilihan langsung, dimana setiap warga negara yang memiliki hak untuk memilih diperbolehkan berpartisipasi dalam pemilihan.

Pemilihan presiden menentukan siapa yang akan terpilih sebagai Presiden Republik untuk masa jabatan lima tahun, tidak seperti tahun 1991 yaitu masa jabatan tujuh tahun.

2.4 Kerangka Berfikir

Penulis dalam hal ini menggambarkan kerangka berpikir dalam sisi normatif dan sesuai Undang-Undang masing-masing negara dalam melakukan penelitian ini. Kerangka berpikir bisa dilihat sebagai berikut :





2.4.1 Penjelasan

Peneliti mendasarkan penelitian ini pada dasar-dasar hukum yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Rahmat Tuhan Yang Mah Esa, Loi organique numero 2012-005 portant code electoral (Undang-Undang nomor 2012-005 tentang “kode pemilihan”), Loi numero 2015-020 relative a la structure Nationale Independante chargee de L’organisation de la Gestion des Operation Electorales Denommee “commission Electorale Nationale Independante”.

Kemudian dasar-dasar hukum tersebut dijadikan sebagai landasan dalam penelitian tentang administrasi pemilu presiden di Indonesia pada masa reformasi (2005) dan administrasi pemilu presiden di Madagaskar pada masa transisi (2013), juga mengkaji beberapa permasalahan yaitu

1. Mendeskripsikan administrasi pemilu presiden di Indonesia pada masa reformasi (2005) dan administrasi pemilu presiden di Madagaskar pada masa transisi (2013).
2. Menemukan perbedaan administrasi pemilu presiden di Indonesia pada masa reformasi (2005) dan administrasi pemilu presiden di Madagaskar pada masa transisi (2013).

Kerangka berfikir diatas merupakan sarana untuk mencapai hasil akhir dari penelitian ini yaitu dapat dijadikan tolak ukur administrasi pemilu presiden di

Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Madagaskar. Serta sebagai penambahan pengetahuan tentang Negara Republik Madagaskar.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang berupa paparan hasil penelitian yang membahas suatu masalah dalam bidang hukum dan pemecahannya menguatkan kaidah hukum atau kaidah ilmu lain yang relevan (FH UNNES, 2005, hlm.1). Oleh karena itu hal-hal yang dapat membantu untuk memperlancar penyusunan skripsi ini diperlukan adanya suatu data-data. Untuk memperoleh data-data ini diperlukan beberapa metode sebagai pedoman, karena metode penelitian ini merupakan unsur yang penting dalam penelitian.

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang digunakan manusia sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yang dilakukan secara metodologis ilmiah dan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan penelitian diatas, pilihan metode penelitian yang tepat akan menghasilkan penelitian yang terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian ini didasarkan pada hal berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian (*research*) pada hakikatnya adalah suatu kegiatan pencarian kebenaran dari ilmu pengetahuan. Penelitian diawali karena adanya keraguan dan

keingintahuan dari peneliti terhadap suatu masalah tertentu. Soerjono Soekanto berpendapat mengenai definisi penelitian sebagai berikut. (Soerjono, 1986, hlm.3)

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang digunakan manusia sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yang dilakukan secara metodologis ilmiah dan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

Berdasarkan uraian yang berkaitan dengan penelitian diatas, pilihan metode penelitian yang tepat akan menghasilkan penelitian yang terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian ini didasarkan pada hal berikut:

Pendekatan penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

Suharsimi Arikunto mengemukakan Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dari ungkapan tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum Sedangkan berpendapat bahwa Pendekatan Penelitian adalah seperangkat asumsi yang saling berkorelasi satu dengan yang lain mengenai fenomena alam semesta (Suratman, 2012). Pada dasarnya ada 3 (tiga) pendekatan penelitian yang selama ini digunakan dalam

penelitian ilmiah yaitu Penelitian Kualitatif, Penelitian Kuantitatif, dan Penelitian Triangulasi yang merupakan penggabungan dari Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif.

Penyajian analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang berarti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Pendekatan kualitatif dalam hal ini adalah penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti dengan lebih rinci, definisi ini lebih melihat perspektif emik atau segala sesuatu dilihat berdasarkan kacamata orang yang diteliti. Maka pada skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas, dan juga bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, skripsi ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi pemilu presiden di Indonesia pada masa reformasi (2005) sudah dapat terlaksana dengan baik. Namun ada hal yang harus diperbaiki: (1) dari Undang-Undang yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu (KPU); (2) waktu persiapan pemilu yang bisa dikatakan kurang, untuk melaksanakan pemilu terutama dalam hal sosialisasi masyarakat. Sedangkan penyelenggaran administrasi pemilu presiden di Madagaskar pada masa transisi (2013) juga terlaksana dengan baik. Namun masih ada kekurangan yang harus diperbaiki, (1) Undang-Undang bersifat sementara yang dibuat kusus untuk pemilu tersebut; (2) lembaga negara yang tidak independen, karena sebagianya terdiri dari partai politik yang ikut pemilihan; (3) anggaran yang kurang untuk melakukan pemilihan.
2. Perbedaan pemilu presiden Indonesia dan Madagaskar meliputi beberapa hal sebagai; pada masa reformasi (2005) yang dipilih adalah Presiden dan Wakil presiden, lembaga negara (KPU) yang mengatur pemilu pada masa reformasi bersifat mandiri dan independen, jumlah peserta yang ikut pemilu lima (5) pasangan; dari sisi lain pada masa transisi (2013) yang dipilih adalah

Presiden, kalau lembaga negara (CENI-T) yang mengatur pemilu pada masa transisi bersifat sementara, dan yang terakhir jumlah peserta yang ikut pemilu tiga puluh tiga (33) calon.

5.2 Saran

1. Administrasi pemilu terutama penyelenggaraan administrasi pemilu Presiden punya perang besar dalam satu negara, maka lembaga yang mengurus penyelenggaraan pemilihan tersebut harus independen dan mandiri.
2. Perbedaan atau permasalahan yang akan dialami oleh negara mau berkembang cukup banyak, namun sudah banyak juga yang dialami oleh negara yang sudah maju "*we learn by our mistake*".
3. Undang-Undang dan aturan-aturan pemilihan yang ada, harus lebih dipertegas dan diperbaiki agar bisa mengikuti perkembangan dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly (2012), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Asshiddiqie Jimly dan Bagir Manan, *Gagasan Amandemen UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*.

Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

Gerard Roy, 1988. *Contribution a l'histoire des independance Malgaches (1959-1960-1972)*, Editions de l'Orstom, Institut Francais de Recherches Scientifique pour le Developpement en Cooperation, Collection Travaux et travaux microedites.

Galibert Didier, 2002, "Mai 1972 : *la deuxieme independance Malgache*", La Reunion-Madagascar (1942-1972). Departementalisation et Independance, Paris/Saint-Denis de la Reunion, SEDES/Universite de la Reunion.

Moeleong, Lexy J. 1988. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

O'Donnel, Guillermo dan Phelipe C Schmitter. 1993. *Transisi Menuju Demokrasi: rangkaian kemungkinan dan ketidakpastian*. Jakarta: LP3ES.

Prasojo, Eko. 2009. *Reformasi Kedua-Melanjutkan Estafet Reformasi*. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.

Raharjo, M. Dawam. 1999. (Pengantar) *Indonesia dalam Era Transisi Menuju Demokrasi*. Jakarta : Ctk. Pertama, LSAF.

- Rahardjo, Satjipto. 1988. “*keluasan Reformasi Hukum*”, Kompas 8 Mei
- Raison-Jourde Fancoise, 1993, “*Une transition achevee ou amorcee?*”, *politique Africaine*, N. 52, Paris, december.
- Ramandimbarison Jean-claude (october 2003), *Le Cahier de Madagascar* N.1 ed. CDE, p.54.
- Ravaloson Jaona, 1994, “*Transition democratique a Madagascar.*” Collection Repere pour Madagascar et l’ocean indien, L’Harmattan, Paris.
- Sedarmatanti.2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasin dan Kepemimpinan Masa Depan: Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Refika Aditama.h
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunny Ismail. 1968. *Mekanisme Demokrasi Pancasila. Lembaga pembinaan Hukum national*: Jakarta.
- Syahuri Taufiqurrohman, “*Tafsir konstitusi Berbagai Aspek Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Syafiie, Inu kencana (2003), *sistem administrasi negara republik indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Widjaja, H.A.W. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan dan kamus

Undang-Undang dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dengan Rahmat Tuhan yang Mah esa.

Loi Organique Numero 2012-005 Portant Code Electoral.

Loi Numero 2015-020 Relative a la Structure Nationale Independante Chargee de L'Organisation de la Gestion des Operation Electorales Denommee "Commission Electorale National Independante".

Echols, John M. Dan Hassan Shadily. 2005. Kamus Inggris Indonesia: An English-Indonesian Dictionary. Jakarta: PT Gramedia.

Ivenie Dewintari S dan Alvina Tria Febianda, Kamus Istilah Penting Modern, cet. I, (Jakarta: Aprindo, 2003).

Non Buku

Alrasid Harum, *"Masalah Pengisian Jabatan Presiden Sejak Sidang Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia 1945 Sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993"*, (Disertasi S3 Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1993).

Raharisolondraibe Tinoka Malala Daniela, *La Neutralite de l'Administration Pendant L'elections presidentiel*, tidak diterbitkan, *Universite aceem* (2014)

Yara Muchyar, *Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia* (Suara tinjauan Sejarah Hukum Tata Negara), cet. I, (Jakarta: Nadhilah Ceria Indonesia, 1995).

Madagascar, pre-colonial era, prior to 1894, country guide, Malagasy information resource

Maury Jean-Pierre, "Republique de Madagascar" (july 2006).

<http://gasikar-histo.e-monsite.com/pages/independance/election-presidentielle.html>

<http://www.ceni-madagascar.mg/documents/>

<http://aguzssudrazat.blogspot.co.id/2012/03/perbandingan-sistem-pemilu-negara.html>

The logo of Universitas Negeri Semarang (UNNES) is centered at the bottom of the page. It features a large, stylized yellow emblem above the text "UNNES" in a bold, grey, sans-serif font. Below "UNNES" is the full name "UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG" in a smaller, grey, sans-serif font.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG